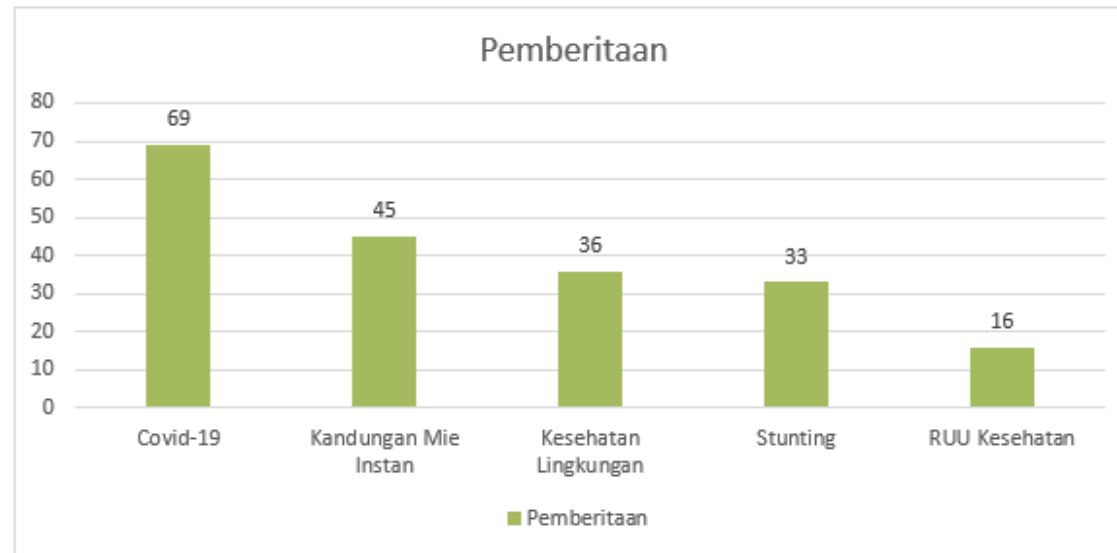


TREN PEMBERITAAN 26 APRIL - 2 MEI 2023



Covid-19

- Anggota Satuan Tugas (Satgas) Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Soedjatmiko mengimbau masyarakat agar waspada terhadap penularan Covid-19. Imbauan ini menyusul adanya peningkatan kasus positif yang mencapai angka 2 ribuan beberapa hari terakhir. Masyarakat diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi.
- Konfirmasi positif Covid-19 kembali melonjak mencapai 2.067 kasus pada Jumat (28/4). Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 di Indonesia sejak pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 kini menjadi 6.771.072 kasus. Jumlah pasien yang pulih usai terinfeksi virus Covid-19 bertambah 1.310 dari hari sebelumnya. Total pasien sembuh menjadi 6.597.965 orang. Sementara itu, pasien meninggal akibat Covid-19 bertambah 37 orang. Dengan demikian, total meninggal menjadi 161.258 orang. Kasus aktif Covid-19 tercatat 11.849 orang atau naik 720 kasus dari kemarin. Sedangkan kasus suspek Covid-19 sebanyak 2.004 orang dan spesimen yang diperiksa 21.862 sampel. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan setidaknya ada lima daerah yang mencatatkan penambahan pasien positif Covid-19 di atas 100 kasus.

Kandungan Mie Instan

BPOM RI memastikan Indomie Rasa Ayam Spesial yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi karena telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk sebelum beredar. BPOM memandang ada ketidaksesuaian peraturan di Indonesia dengan Taiwan terkait penggunaan Etilen Oksida (EtO) untuk pangan. Diketahui, otoritas kesehatan kota Taipei melaporkan keberadaan EtO pada bumbu Indomie Rasa Ayam Spesial produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, sebesar 0,187 mg/kg (ppm). Taiwan tidak memperbolehkan EtO pada pangan. Sementara di Indonesia telah mengatur Batas Maksimal Residu (BMR) 2-CE sebesar 85 ppm melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 229 Tahun 2022 tentang Pedoman Mitigasi Risiko Kesehatan Senyawa Etilen Oksida. Dengan demikian, kadar 2-CE yang terdeteksi pada sampel mi instan di Taiwan (0,34 ppm) masih jauh di bawah BMR 2-CE di Indonesia dan di sejumlah negara lain, seperti Amerika dan Kanada. sampai saat ini, Codex Alimentarius Commission (CAC) sebagai organisasi standar pangan internasional di bawah World Health Organization/Food and Agriculture Organization (WHO/FAO) belum mengatur batas maksimal residu EtO.

Kesehatan Lingkungan

Semenjak pekan lalu hampir sebagian besar negara-negara di Asia Selatan masih terdampak gelombang panas atau "heatwave". Di Indonesia, tepatnya di Ciputat, Tangerang Selatan, suhu maksimum harian pekan lalu tercatat mencapai 37,2 di stasiun pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pakar Peneliti Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global Dicky Budiman mengungkapkan jika situasi ini bisa menjadi ancaman serius khususnya pada orang lanjut usia dan anak-anak, karena dua kelompok ini adalah kelompok rentan dengan suhu ekstrim. Suhu udara yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya dehidrasi dan peningkatan penyakit lain. Selain itu, cuaca panas juga dapat meningkatkan risiko perburukan. Situasi ini juga berdampak pada masyarakat secara umum. Dengan suhu panas seperti itu, aktivitas menjadi sangat terbatas atau alami gangguan. Bisa saja berisiko menyebabkan kecelakaan kerja atau kecelakaan di lalu lintas karena panas.

Di sisi lain, kebutuhan energi meningkat jauh lebih tinggi, khususnya pada pengaturan suhu seperti pendingin ruangan. Lebih lanjut, Dicky menjelaskan jika cuaca panas juga tidak hanya akan berdampak pada aspek kesehatan. Misalnya, cuaca panas ini bisa berdampak pada pertanian dan peternakan.

Stunting

Survei Litbang Kompas pada awal April 2023, mencatat sejumlah penyebab utama anak mengalami stunting yaitu karena asupan makanan yang tak bergizi (32,4%), kurangnya gizi ibu hamil (28,2%), kebersihan tidak terjaga (4,8%), infeksi virus atau bakteri (4,1%), dan tingkat ekonomi rendah (2,8%). Berdasarkan hasil tersebut, menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat peran orang tua sangat penting dalam upaya mengatasi kondisi stunting pada anak, melalui pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.

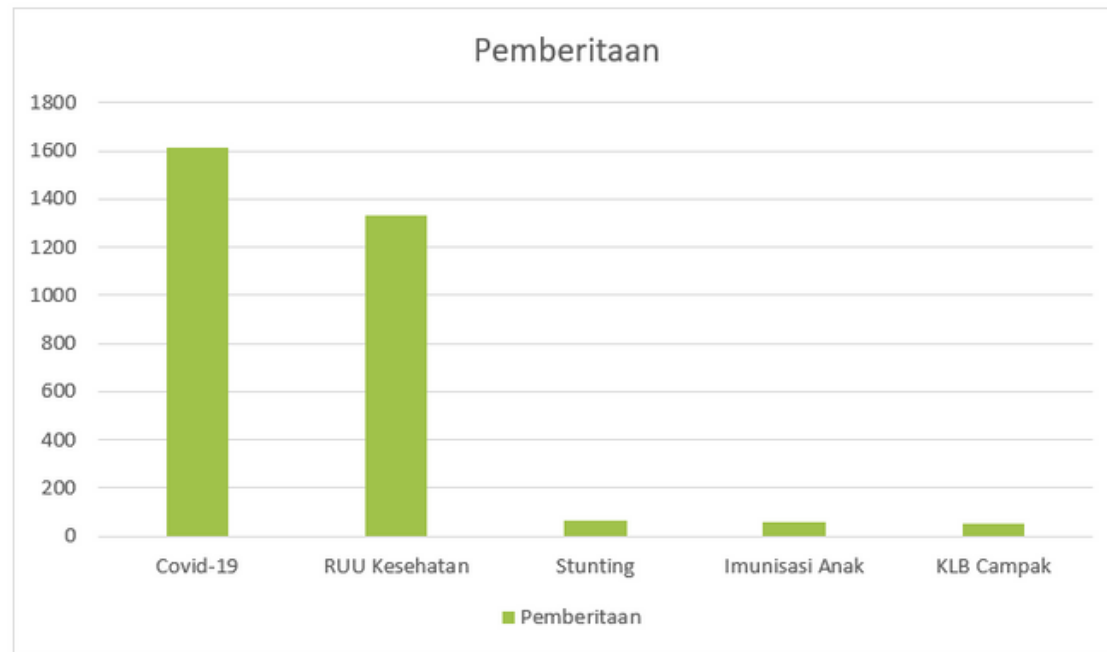
RUU Kesehatan

Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan adanya aturan yang mengatur tentang kesehatan jiwa dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa yang berdasarkan berbagai data menunjukkan peningkatan prevalensi di Indonesia dari tahun ke tahun. Dia menjelaskan peningkatan prevalensi orang yang memiliki masalah kesehatan jiwa meliputi mereka yang mengalami stres, depresi, demensia, gangguan makan, tidur, bipolar, hingga skizofrenia.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu Covid-19 yang menekankan pada kewaspadaan terhadap penularan Covid-19 menyusul adanya peningkatan kasus positif yang mencapai angka 2 ribuan beberapa hari terakhir. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Pusjak Upaya Kesehatan) dan Kebijakan Sistem Ketahanan Surveilans dan Pemeriksaan Laboratorium (Pusjak SKK dan SDK).

TREN PEMBERITAAN 3 - 9 MEI 2023



Covid-19

- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan pandemi Covid-19 telah berakhir. Kini, Covid-19 sudah tidak menjadi kondisi darurat kesehatan global lagi. Menurut WHO, pandemi Covid-19 yang merupakan penyakit mematikan yang telah menewaskan 6,9 juta jiwa di seluruh dunia itu pada hari ini, Jumat (5/5/2023) dinyatakan selesai.
- Meski WHO telah mencabut status "darurat kesehatan global" untuk Covid-19, pemerintah Indonesia menyatakan masyarakat tetap harus waspada karena virus itu masih bersifat menular seperti penyakit lainnya. Bahkan Kementerian Kesehatan menyatakan dengan pencabutan status itu tidak berarti Covid-19 dinyatakan menghilang. Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan pencabutan status bencana nasional Covid-19. Akan tetapi, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum pemerintah benar-benar membuat kebijakan itu. Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril mengatakan, pemerintah meminta semua pihak menunggu waktu pencabutan status tersebut. Untuk melakukannya, pemerintah perlu mencabut aturan yang selama ini menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional.

RUU Kesehatan

- Juru Bicara Kemenkes dr Mohammad Syahril kembali buka suara terkait pro kontra Rancangan undang-undang (RUU) Kesehatan yang saat ini ramai diperdebatkan. Sebelumnya, sejumlah organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), menyatakan ketidaksetujuan terhadap draf RUU Omnibus Kesehatan ini. Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak dilibatkan dalam pembuatan RUU. Padahal mereka adalah representasi formal profesi dokter, dokter gigi, dan perawat, yang akan terimbas serius oleh legislasi ini. Menanggapi hal tersebut, dr. Syahril lantas mengungkapkan bagaimana proses untuk merancang draf RUU Omnibus Kesehatan yang menelisik beragam isu kesehatan, mulai dari praktik kedokteran hingga BPJS.
- Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) telah rampung menggelar agenda bahtsul masail yang diikuti para kiai dan nyai selIndonesia di Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (6/5/2023). Salah satu komisi di dalam bahtsul masail yang digelar LBM PBNU itu membahas soal polemik RUU Kesehatan, terutama pada Pasal 154 yang menyejajarkan tembakau dengan zat adiktif lain seperti psikotropika, narkotika, dan alkohol. Ketua LBM PBNU KH Mahbub Ma'afi mengatakan RUU Kesehatan merupakan regulasi yang kontroversial karena ada satu bagian yang secara eksplisit menyamakan produk olahan tembakau dengan zat adiktif lainnya. Kiai Mahbub pun mempertanyakan tentang aturan penggunaan kemasan yang ada di dalam RUU Kesehatan. Ia heran lantaran tidak ada peringatan di botol minuman keras.

Stunting

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan, pemerintah di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut berupaya menurunkan angka stunting di bawah 14 persen sebagai target nasional di tahun 2024 mendatang. Menurutnya, salah satu upaya Pemprov Sulut mengatasi persoalan stunting adalah dengan membangun Rumah Sakit Ibu dan Anak yang bertujuan memperbaiki sekaligus mengedukasi bagi ibu hamil. Gubernur juga mengapresiasi terbentuknya tim percepatan penurunan stunting dan pengukuhan 'Bunda Pendamping Keluarga' di provinsi ujung utara Sulawesi tersebut.

Imunisasi Anak

Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Hartono Gunardi mengatakan, tahun 2023 ditargetkan sebanyak 2.722.311 anak perempuan mendapatkan imunisasi vaksin Human Papillomavirus Vaccine (HPV). Sebab, vaksin HPV diyakini sebagai salah satu vaksin yang paling efektif untuk mencegah penyakit kanker leher rahim atau serviks, penyebab kedua kematian pada wanita. Saat ini, katanya, pemerintah lewat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) akan menyalurkan vaksin HPV secara gratis untuk sekolah-sekolah. Hartono menyebut, anak perempuan yang ditargetkan mendapatkan vaksin HPV yakni murid kelas lima Sekolah Dasar (SD) untuk dosis pertama dan kelas enam untuk dosis kedua.

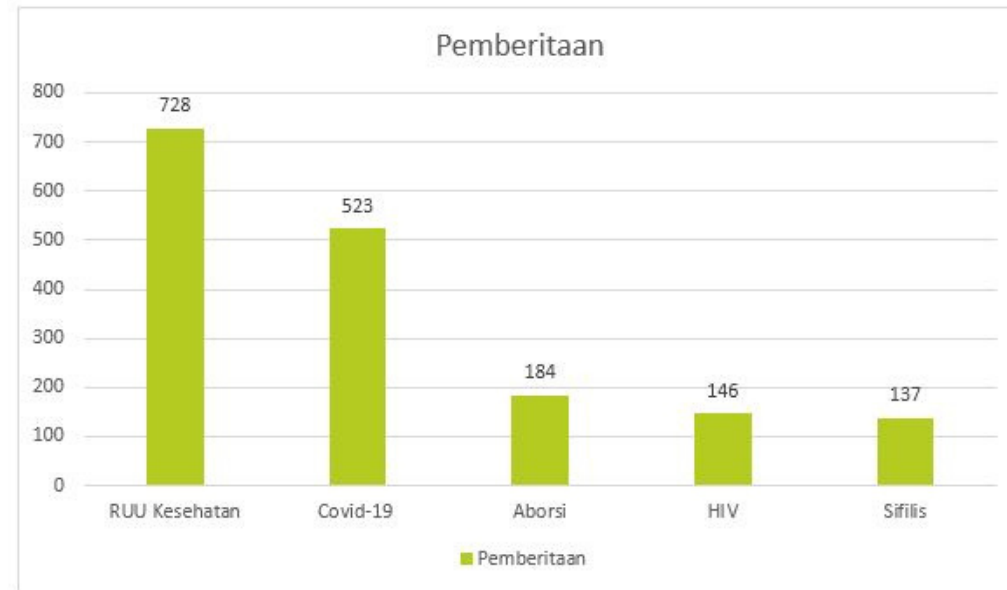
KLB Campak

Seperti yang diketahui, pemberian imunisasi wajib dilakukan sejak anak dilahirkan hingga usia sekolah. Dokter spesialis anak konsultan infeksi dan penyakit tropik Dr. dr. Raihan, Sp.A, mengatakan ini merupakan investasi masa depan yang dapat menekan dan mencegah penyakit yang menyebabkan kematian. "Secara luas sudah diakui imunisasi memang salah satu intervensi kesehatan paling berhasil dan sukses di dunia," kata dokter Raihan dalam seminar media IDAI 'Ayo Lindungi Diri, Keluarga dan Masyarakat dengan Imunisasi Lengkap'. Lebih lanjut, dokter Raihan mengatakan ketidakefektifan pemberian vaksinasi dapat menyebabkan penyakit sulit dikendalikan dan berisiko memicu terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Status imunisasi anak yang tidak lengkap membuat si kecil berisiko terhadap penyakit infeksi dan penyakit tidak menular berikut.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu Covid-19 yang menekankan pada Pemerintah Indonesia meminta masyarakat tetap harus waspada karena virus itu masih bersifat menular seperti penyakit lainnya. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Pusjak Upaya Kesehatan) dan Kebijakan Sistem Ketahanan Surveilans dan Pemeriksaan Laboratorium (Pusjak SKK dan SDK).

TREN PEMBERITAAN 10 - 16 MEI 2023



RUU Kesehatan

- Koalisi Organisasi dan Forum Komunikasi Tenaga Kesehatan (Forkom Nakes) menyatakan terdapat sejumlah poin penting yang membuat RUU Kesehatan perlu segera disahkan. Koalisi Organisasi Forkom Nakes menyatakan, RUU Kesehatan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan yang terjadi dalam dunia kedokteran. Koordinator Koalisi Organisasi dan Forkom Nakes, Yenni mengatakan saat ini masih banyak kekurangan pada sistem kesehatan di Indonesia. Salah satunya *income* yang tidak merata atau disparitas gaji antara dokter spesialis dengan dokter umum maupun tenaga kesehatan lain yang tidak sesuai dengan beban kerja. Persoalan lainnya masih terjadinya *bullying* atau perudungan dan sistem feodalisme dalam profesi kesehatan.
- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jawa Tengah (Jateng) menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang pada salah satu ayatnya mengklasifikasikan produk tembakau sama dengan minuman beralkohol dan narkotika. Hasil olahan tembakau pada Pasal 154 Ayat 3 dianggap senilai dengan narkotika dan zat psikotropika, sehingga berpotensi menyulitkan rakyat kecil yang terlibat dalam pengerjaan produk olahan tembakau. Tembakau merupakan produk asli Jawa Tengah dan sudah berjasa ikut membantu perekonomian masyarakat. Wakil ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar ayat tersebut dianulir sehingga tidak mengganggu petani tembakau dan masyarakat.

Covid-19

- Pemerintah kini tengah berfokus pada penguatan sistem kesehatan nasional pasca pencabutan status kedaruratan Covid-19 atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) pekan lalu. Fokus tersebut dilakukan untuk menjamin kewaspadaan dan kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi ancaman pandemi di masa mendatang. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti menjelaskan pencabutan status PHEIC Covid-19 oleh WHO artinya respon negara-negara anggota WHO atas Covid-19 tidak lagi mengikuti respon dalam situasi darurat. Melainkan respon negara sudah harus diarahkan pada penguatan sistem kesehatan yang bersifat jangka panjang dan sistemik mencakup 6 komponen sub sistem kesehatan menurut WHO.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengemukakan bahwa pihaknya mengebut program vaksinasi Covid-19 dosis penguat atau booster kedua kepada 50 persen orang dewasa sehat. Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan program tersebut penting untuk memperpanjang masa perlindungan vaksin Covid-19 dan memastikan tidak terjadi lonjakan kasus di kemudian hari. Kebijakan pemberian vaksinasi Covid-19 dosis *booster* kedua sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang, yakni berdasarkan data dan situasi epidemiologi kasus Covid-19 di Indonesia yang masih fluktuatif dalam beberapa waktu terakhir, serta memastikan Indonesia tidak ada kenaikan gelombang kasus akibat ancaman varian baru.

Aborsi

Geger dokter gigi di Bali melakukan praktik ilegal aborsi pada seribuan wanita, sejak 2020. Menurut keterangan polisi, praktik tersebut paling banyak diminati pasien pelajar dan mahasiswa, satu kali tindakan dikenakan biaya Rp 3,8 juta. Pelaku (WAK) disebut merasa kasihan dan niat menolong. "Alasannya ya kasihan dengan anak-anak tersebut masa depannya seperti apa. Niatnya menolong, tapi menolong yang salah," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali AKBP Ranefli Dian Candra. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) drg Usman Sumantri menyebut masih mendalami kasus yang bersangkutan. Ia memastikan dokter tersebut sebetulnya tidak terdaftar sebagai pengurus PDGI, sehingga tidak memiliki izin praktik. Terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI dr Siti Nadia Tarmizi mengutarakan hal yang sama. Menurutnya, Dinkes setempat sudah ikut 'turun tangan'.

HIV

Kemenkes mengungkapkan bahwa sebanyak 5.100 ibu rumah tangga terpapar HIV setiap tahunnya. Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan bahwa ibu rumah tangga memang rentan terpapar HIV, terutama bila ada perilaku seksual yang berisiko dari suami. "Sebesar 33 persen data (menunjukkan bahwa) ibu rumah tangga positif HIV karena terpapar dari pasangannya yang memiliki perilaku seksual yang berisiko. Setiap tahunnya, terdapat penambahan kasus HIV baru pada ibu rumah tangga sebanyak 5.100," ungkap Syahril dalam konferensi pers daring.

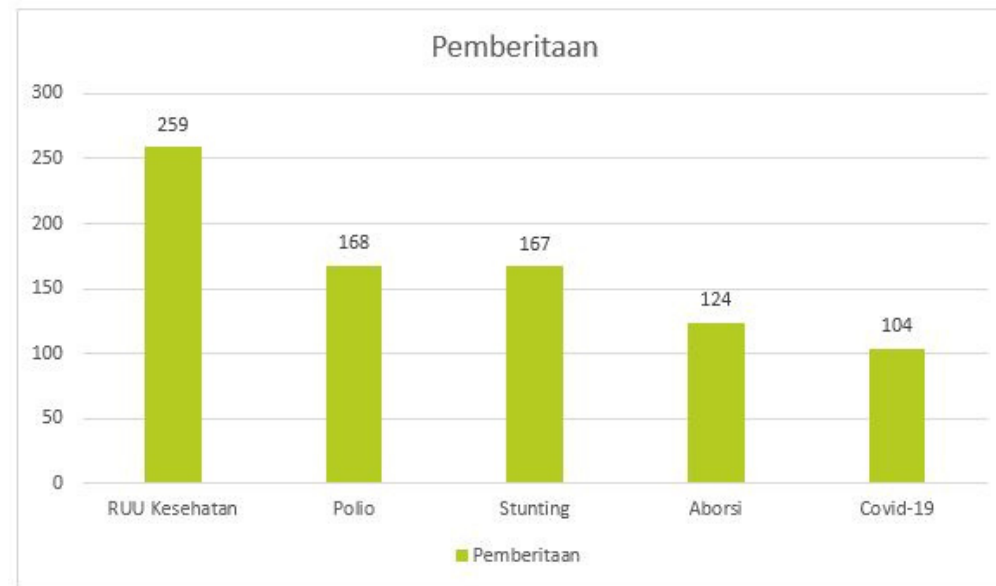
Sifilis

Kemenkes menyatakan ada kenaikan kasus sifilis hingga 70 persen di Indonesia. Mohammad Syahril, selaku juru bicara Kemenkes menyebut bahwa kasus sifilis meningkat hampir 70 persen ini dihitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni 2018 sampai 2022. Sifilis atau penyakit raja singa adalah Infeksi Menular Seksual (IMS) yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit sifilis atau juga dikenal dengan penyakit raja singa adalah Penyakit Menular Seksual (PMS) yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Pallidum*. Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Idham Choliq menyebut ada efek kesehatan yang serius dari sifilis bila tanpa pengobatan yang memadai. Menurutnya, penyakit ini dimulai sebagai luka yang tidak nyeri, biasanya di alat kelamin, rektum atau mulut. Jika tidak diobati, penyakit ini dapat merusak jantung, otak atau organ lain, dan dapat mengancam jiwa.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu RUU Kesehatan yang menekankan pada disparitas gaji antara dokter spesialis dengan dokter umum maupun tenaga kesehatan lain yang tidak sesuai dengan beban kerja. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Pusjak SKK dan SDK).

TREN PEMBERITAAN 17 - 23 MEI 2023



RUU Kesehatan

- Komunitas Kretek menilai belum ada urgensi masuknya aturan mengenai tembakau pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Juru Bicara Komunitas Kretek, Siti Fatona, menilai aturan yang lama sudah sangat komprehensif mengatur soal tembakau. Siti menyoroti pasal 154 pada RUU Kesehatan yang menyetarakan tembakau dengan narkoba dan psikotropika sebagai zat adiktif. Selain pasal 154, Siti juga menyoroti sejumlah pasal lain yang berpotensi berbahaya dalam RUU Kesehatan. Pasal tersebut antara lain, Pasal 156 yang mengatur terkait standarisasi kemasan bagi produk tembakau, khususnya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Penyetaraan yang terjadi dalam RUU ini dianggap beberapa pihak akan membuka celah delegitimasi tembakau sebagai produk legal.
- RUU Kesehatan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan terbaik para perempuan dan anak perempuan korban pemerkosaan dan kekerasan seksual, terutama yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Hal ini penting untuk memastikan hak korban kekerasan seksual atas layanan kesehatan komprehensif dijamin negara. Selain itu, RUU Kesehatan juga harus memiliki perspektif perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dan pemerkosaan serta harmonis dengan peraturan perundangan lain. Meski telah diharmonisasi dengan UU No 1/2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan

pengecualian aborsi dalam RUU Kesehatan, misalnya, diharapkan berpihak pada korban pemerkosaan dan kekerasan seksual. Oktavinda Safitry dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia mengusulkan ada pasal yang mempertegas soal layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual. Pasal tersebut harapannya mencakup promotif, preventif, kuratif, pembuktian, visum, pemberian kontrasepsi darurat, hingga aborsi sampai pelayanan pasca aborsi.

Polio

- Dinas Kesehatan (Dinkes) mencatat terdapat 99 kasus terduga di Ibu Kota sejak Januari hingga Mei 2023. "Jumlah terduga polio di Jakarta 1 Januari-19 Mei ada 99 kasus," kata Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Ngabila Salama, Jumat (19/5). Ngabila merinci sebaran terduga kasus polio paling banyak di wilayah Jakarta Timur dengan 33 kasus. Disusul Jakarta Barat 25 kasus, Jakarta Selatan 18 kasus, Jakarta Utara 17 kasus, Jakarta Pusat 5 kasus, dan Kepulauan Seribu 1 kasus.
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) mencanangkan sub pekan imunisasi nasional (PIN) Polio kedua. Tetesan imunisasi polio tersebut penting melindungi anak-anak Tapsel berusia 0-59 bulan dari serangan polio yang bisa berdampak buruk terhadap kesehatan anak. Anak-anak yang terserang penyakit polio bisa menyebabkan anak-anak tumbuh layu, mengalami kelumpuhan, cacat seumur hidup, hingga kematian.

Stunting

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mendorong pengelola gizi dan KIA di provinsi, kabupaten, kota, Puskesmas, dan mitra untuk memanfaatkan pangan lokal bergizi sebagai Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan Balita. PMT berbahan pangan lokal merupakan salah satu kegiatan yang telah diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, khususnya mendukung pencapaian indikator ibu hamil kurang energi kronik (KEK) dan Balita gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 angka prevalensi stunting turun menjadi 21,6% dari yang sebelumnya 24,4% dan angka wasting naik jadi 7,7% dari 7,1%. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan ketika anak mengalami berat badan tidak naik atau turun dan gizi kurang selama 1 bulan harus segera ke Puskesmas untuk mendapatkan intervensi stunting.

Aborsi

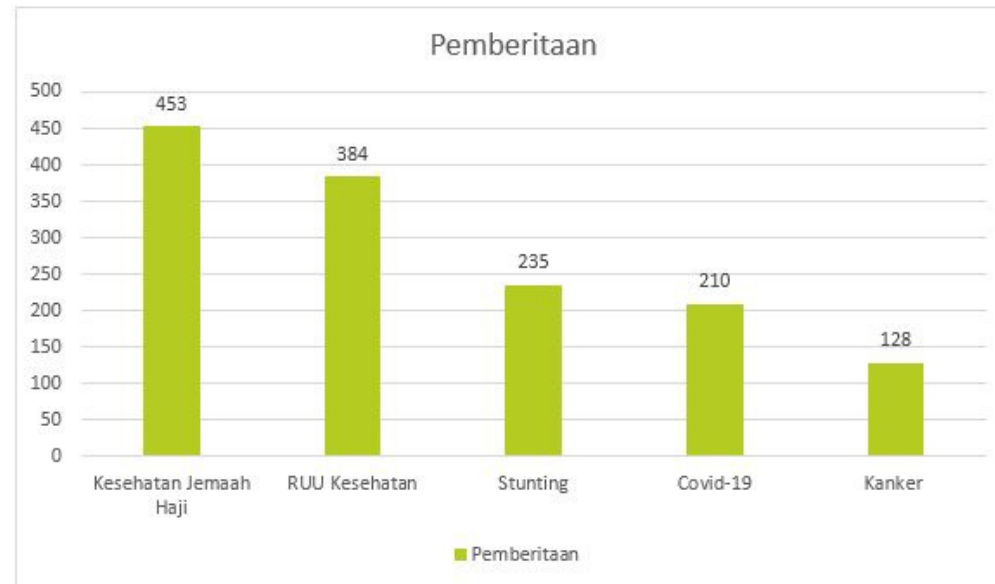
Dokter gigi I Ketut AW (53) ditetapkan sebagai tersangka kasus praktik aborsi di Jalan Padang Luwih, Dalung, Badung, Bali. Selama buka praktik gelap sejak 2020, drg I Ketut AW telah mengaborsi 1.338 pasiennya. Hal itu diketahui polisi setelah mengecek pembukuan yang ada di lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara (TKP). Pasang tarif, Rp 3,8 juta I Ketut AW sudah berstatus residivis dan berkali-kali diamankan. Ia pertama kali diamankan pada tahun 2006, selanjutnya pada tahun 2009 dan kini diamankan untuk ketiga kalinya. Penangkapan berawal dari informasi yang diterima oleh Tim SUBDIT V Siber DITRESKRIMSUS Polda Bali, di mana seorang pelapor melakukan browsing di internet. Dengan kata kunci "dokter I Ketut AW". Setelah 2 minggu melakukan penyelidikan, petugas lalu menggebrek tempat praktik tersebut. Saat itu pula petugas menggeledah dan menemukan banyak barang bukti. Terdapat alat-alat medis yang digunakan untuk melakukan praktik aborsi, beserta dengan obat-obatannya.

Covid-19

Kesepakatan pandemi baru yang sedang dinegosiasikan harus menjadi "perjanjian bersejarah" yang menandai perubahan dramatis dalam pendekatan keamanan kesehatan global setelah krisis COVID-19, kata kepala Organisasi Kesehatan Dunia pada hari Minggu. "Kita tidak bisa begitu saja melanjutkan seperti yang kita lakukan sebelumnya," kata Tedros Adhanom Ghebreyesus saat membuka pertemuan tahunan WHO di Jenewa. Negara-negara anggota WHO telah memulai negosiasi menuju kesepakatan internasional yang bertujuan untuk memastikan dunia lebih siap untuk mencegah atau merespons dengan lebih efektif saat pandemi melanda. Prosesnya masih dalam tahap awal, tetapi tujuannya adalah agar kesepakatan dapat dicapai tepat waktu untuk Majelis Kesehatan Dunia berikutnya, pada Mei 2024.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu RUU Kesehatan yang menyoroti pasal 154 pada RUU Kesehatan yang menyetarakan tembakau dengan narkoba dan psikotropika sebagai zat adiktif. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Program Kesehatan Masyarakat, Pusjak Upaya Kesehatan dan Kebijakan Promosi Kesehatan, Deteksi Dini dan Pengendalian PTM, Pusjak Upaya Kesehatan.



Kesehatan Jemaah Haji

- Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bekerja sama dengan 2 rumah sakit di Madinah, Arab Saudi. Menurut Kepala Daerah Kerja (Daker) PPIH Madinah, Zaenal Muttaqin, mereka bekerja sama dengan Rumah Sakit King Fahd dan Rumah Sakit King Salman Bin Abdul Aziz di Madinah yang menjadi rujukan bagi para jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan. Kedua rumah sakit itu juga siap bekerja sama dengan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk jemaah haji Indonesia. KKHI Madinah dilengkapi fasilitas 69 tempat tidur yang terdiri atas 10 tempat tidur Instalasi Gawat Darurat (IGD), 7 tempat tidur *Intensive Care Unit* (ICU), 2 tempat tidur isolasi, 43 tempat tidur rawat inap, dan 7 tempat tidur psikiatri. KKHI Madinah juga dilengkapi dengan laboratorium, apotek, poli gigi, 11 unit ambulans, serta sarana pendukung seperti USG, EKG, dan Echocardiografi.
- Kemenkes mengirimkan 107 ton obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan kepada jemaah Indonesia di Arab Saudi. Rincian obat dan perbekalan itu meliputi obat saluran napas, saluran cerna, antidiabetes, analgesik dan antiinflamasi, kardiovaskuler, multivitamin, larutan elektrolit, dan susu. Kemenkes juga menyiapkan 206.400 paket sebagai penunjang kesehatan Jemaah. Paket-paket tersebut akan diberikan kepada para jemaah di embarkasi. Selain paket jemaah disiapkan pula paket obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 524 paket yang akan dibawa petugas kloter (dokter kloter) yang mendampingi jemaah selama melaksanakan ibadah.

RUU Kesehatan

- Penolakan atas pasal zat adiktif yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika di Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan terus menggema di masyarakat. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Subagyo mempersoalkan mengapa daftar investarisasi masalah (DIM) pemerintah tiba-tiba memasukkan pasal zat adiktif yang dikaitkan dengan tembakau dalam RUU Kesehatan. Firman yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kesehatan mempertanyakan mengapa justru pemerintah kembali memasukan aturan zat adiktif yang pada rapat-rapat sebelumnya tidak pernah dibahas dengan DPR.
- Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan aturan itu akan melahirkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik. "Kami akan terus melakukan *public hearing* untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi teman-teman, sekaligus meluruskan substansi yang berkembang di luar, yang sejatinya tidak seperti yang kami bahas bersama pemerintah," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dia menegaskan Komisi IX DPR RI akan mengawal aspirasi dari seluruh pihak dalam pembahasan RUU Kesehatan. Aspirasi diperlukan untuk mewujudkan instrumen perlindungan dan kepastian pemenuhan hak kesehatan masyarakat.

Stunting

- Menko PMK, Muhadjir Effendy menambahkan penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa. Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas. "Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stunting. Karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita," ungkapnya.
- Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kasus stunting di Ibu Kota masih tertinggi hingga mencapai sepuluh ribu kasus. Wilayah Jakarta Utara masih tercatat paling tinggi. Heru mengatakan meskipun angka tersebut terbilang cukup tinggi, namun pihaknya terus melakukan upaya dalam penanganan kasus stunting dengan memberikan edukasi cara hidup sehat kepada masyarakat. Heru juga mengungkapkan tim kesehatan dalam hal ini Puskesmas di Jakarta telah memiliki inovasi-inovasi tersendiri untuk mengatasi stunting.

Covid-19

Kebijakan pemberian vaksin Covid-19 sekarang yang dapat menggunakan merek atau regimen apapun turut menuai pertanyaan, apakah menjadi sinyal segera diterapkannya vaksin Covid-19 berbayar? Apalagi rencana vaksin berbayar berembus jika Indonesia sudah memasuki masa endemi. Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Mohammad Syahril memastikan program vaksinasi Covid-19 saat ini masih gratis alias tidak dipungut biaya. Masyarakat tinggal datang ke fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi untuk disuntik vaksin. Sampai saat ini, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak dipungut biaya. Seluruh pelaksanaan pelayanan vaksinasi masih tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan, yaitu gratis bagi seluruh masyarakat, baik dosis primer maupun *booster*.

Kanker

Juru Bicara Kemenkes dr. Mohammad Syahril menyampaikan bahwa Kemenkes tengah merencanakan program pemberian vaksin *human papillomavirus* (HPV) gratis kepada perempuan berusia dewasa. Namun, Syahril menambahkan, belum bisa dipastikan waktu pelaksanaan dan usia sasaran program pemberian vaksinasi HPV gratis untuk usia dewasa tersebut. Sebelumnya, Kemenkes mengumumkan vaksin HPV sudah bisa diterima secara gratis oleh anak perempuan kelas lima dan enam SD di seluruh wilayah Indonesia mulai 2023. Ini merupakan program lanjutan setelah hanya digratiskan di delapan provinsi pada tahun 2022 lalu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan vaksinasi HPV gratis ini akan menjadi bagian dalam program imunisasi rutin. Program pemberian vaksinasi HPV secara gratis diberikan guna mencegah angka pengidap kanker leher rahim (kanker serviks) pada Wanita.

Kesimpulan

Tren pemberitaan paling banyak pada isu kesehatan Jemaah Haji yang menyoroti kerja sama PPIH dengan 2 rumah sakit di Madinah, Arab Saudi yang dijadikan rujukan bagi para jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini dapat menjadi masukan bagi Kebijakan Kesehatan Bilateral, Pusjak KGTK.